

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KERENTANAN KEMISKINAN (PK2) DI DESA NGALE KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI

Nur Ahmed

S-1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: nurahmed@mhs.unesa.ac.id

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.

S-1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: indahprabawati@unesa.ac.id

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah utama yang sering menjadi sorotan publik, dimana masyarakat belum bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masalah ini terjadi di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah mencapai 4.332,59 ribu jiwa. Dengan adanya masalah kemiskinan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2). Program ini bertujuan untuk membantu agar masyarakat rentan yang berada pada desil 2 dan desil 3 tidak terperosok pada desil 1. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan teori implementasi *bottom up* menurut Elmore, Lipsky, Hjern & O'Porter (Tahir, 2015:136) yang terdiri dari Identifikasi Jaringan Aktor yang Terlibat, Jenis Kebijakan, Kebijakan Sesuai Harapan, dan Prakarsa Masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Ngale telah memenuhi keempat komponen implementasi kebijakan. Aktor implementasi kebijakan saling bersinergi dalam melaksanakan program, seluruh tahapan program PK2 telah terlaksana, target sasaran sudah sesuai dengan data PPLS 2015, tujuan dari program sudah sesuai dengan pedoman meskipun masih terdapat beberapa kendala.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Kemiskinan, PK2

Abstract

Poorness is a major problem that is often a public spotlight, where people cannot yet meet their daily needs. This problem occurred in East Java Province with a total of 4,332.59 thousand people. With the existence of the poverty problem, the East Java Provincial Government launched a Poverty Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2). This program aims to help vulnerable people in decile 2 and decile 3 not fall into decile 1. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. While the focus of the study uses the theory of bottom up implementation according to Elmore, Lipsky, Hjern & O'Porter (Tahir, 2015: 136) which consists of Identifying the Network of Actors Involved, Types of Policies, Policies According to Expectations, and Community Initiatives. Data collection techniques through interview techniques, observation, and documentation were analyzed using data analysis techniques according to Miles and Huberman which included data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that Ngale Village has fulfilled the four components of policy implementation. Actors implementing policies work together in implementing the program, all stages of the PK2 program have been implemented, the target has been in accordance with the 2015 PPLS data, the objectives of the program are in accordance with the guidelines although there are still some obstacles.

Keywords: Policy Implementation, Poverty, PK2

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan sosial yang krusial, dimana masyarakat belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu pendidikan, pendapatan, gender, serta kondisi lingkungan. Menurut Sholeh (2011),

definisi tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral

Di Indonesia, masalah kemiskinan yang dihadapi tersebut tersebar secara merata baik di perkotaan maupun

di pedesaan. Tidak terkecuali juga di Provinsi Jawa Timur, dimana jumlah penduduk miskin mencapai 4.332,59 ribu jiwa (BPS, 2018). Dengan adanya permasalahan tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan program baru dalam mengatasi kemiskinan. Program tersebut yaitu Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra). Program Jalin Matra memiliki tiga kegiatan unggulan, antara lain yaitu Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM) dengan sasaran rumah tangga sangat miskin dengan status kesejahteraan 1-10% terendah (desil 1), Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dengan sasaran kepala rumah tangga perempuan dengan status kesejahteraan 1-10% terendah (desil 1), dan Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) dengan sasaran rumah tangga rentan miskin dengan status kesejahteraan 11-30% terendah (desil 2 dan desil 3).

Program Jalin Matra ini dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di setiap kabupaten/kota di seluruh Provinsi Jawa Timur dan akan dikelola oleh BUMDesa. Dalam hal ini, BUMDesa sebagai instrument pemberdayaan masyarakat pedesaan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Program Jalin Matra digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengentaskan masalah kemiskinan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016, tentang pedoman umum program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

Salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk miskin relatif banyak yaitu Kabupaten Ngawi. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ngawi mencapai 123,76 ribu jiwa. Kabupaten Ngawi sendiri termasuk dalam kategori desil 3, sehingga Kabupaten Ngawi dijadikan sebagai Pilot Project program PK2. Program ini dilaksanakan di Desa Ngale pada bulan November tahun 2017. Desa Ngale mendapat program PK2 karena mendapatkan rekomendasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur berdasarkan data PPLS 2015.

Desa Ngale merupakan salah satu desa yang mendapatkan program Jalin Matra PK2. Program ini diberikan berupa simpan pinjam dengan bunga 1% dan rumah tangga sasaran yang mendapat bantuan ini wajib melakukan pengembalian pinjaman dengan sistem angsuran disetiap bulannya selama 10 bulan. Bagi penerima bantuan diwajibkan untuk membentuk kelompok masyarakat (Pokmas), minimal beranggotakan 5 dalam tiap kelompok, serta bantuan yang diberikan berupa uang maksimal melakukan pinjaman Rp 5.000.000,00. Namun, pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat jalannya program Jalin Matra PK2. Kendala tersebut antara lain, yaitu pendataan penerima bantuan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, penerima bantuan ada yang terlambat dalam membayar angsuran, serta penggunaan dana bantuan yang kurang sesuai dengan tujuan program. Berdasarkan beberapa kendala yang telah dipaparkan, maka hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai proses manajemen strategi. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi".

METODE PENELITIAN

Pada penelitian tentang Implementasi Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi merupakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif yang melibatkan narasumber untuk diperoleh informasinya. Untuk itu, data-data yang sudah diperoleh akan di deskripsikan sesuai keadaan atau fenomena yang terjadi pada saat itu juga. Dalam melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada obyek atau situasi sosial tertentu, perlu menentukan fokus atau inti yang perlu diteliti. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi yang selanjutnya secara rinci akan dilihat dari subfokus-subfokus menurut Elmore, Lipsky, Hjern & O'Porter sebagai berikut : identifikasi aktor yang terlibat, jenis kebijakan, kebijakan sesuai harapan, dan struktur prakarsa masyarakat.

Setelah mengumpulkan data yang diperlukan, maka yang dilakukan peneliti selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dan sederhana. Analisis data dilakukan untuk memahami apa yang terjadi dalam data itu, meringkasnya menjadi kesatuan yang sesuai dan mudah dipahami, serta menemukan suatu pola umum yang timbul dari data tersebut. Teknik analisis data yang diperlukan adalah analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif, dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka perlu adanya pembahasan terkait Implementasi Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk menghasilkan output sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh Pemerintah Provinsi. Berikut adalah aspek implementasi kebijakan Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) yang harus dicapai demi mewujudkan tujuan dari Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2). Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Elmore, Lipsky, Hjern & O.Porter yang meliputi empat indikator yaitu indikator identifikasi aktor yang terlibat, jenis kebijakan, kebijakan sesuai harapan, dan prakarsa masyarakat. Berikut merupakan uraian indikator-indikator tersebut dalam pembahasan:

1. Identifikasi Jaringan aktor yang terlibat

Berkaitan dengan implementasi program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Desa Ngale identifikasi jaringan aktor yang terlibat adalah sumber daya manusia pelaksana yang terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi, Tenaga Pendamping Kabupaten dan Desa, Perangkat Desa Ngale, BUMDesa yang masing-masing menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Program Jalin Matra tahun 2016. Pelaksanaan program PK2 di Desa Ngale tidak melibatkan aktor di tingkat Kecamatan, dalam hal ini adalah Tim Fasilitasi Kecamatan (TFK), karena di Kabupaten Ngawi, untuk Tim Fasilitasi Kecamatan (TFK) hanya mengelola program Jalin Matra Penanggulangan Fenimisme Kemiskinan (PFK).

Jaringan aktor yang terlibat tersebut dapat digambarkan melalui beberapa tahap, yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap persiapan di tingkat kabupaten dimulai dengan mengadakan sosialisasi program PK2 di tingkat kabupaten, sedangkan di tingkat desa dimulai dengan mengadakan pra rebug warga. Tahapan yang kedua adalah tahap perencanaan, dengan mengadakan rebug warga hingga pembentukan pokmas. Tahapan yang ketiga adalah tahapan pelaksanaan, pada tahap ini adalah tahap pencairan dana bantuan dari BUMDesa kepada pokmas. Tahapan yang terakhir adalah tahapan monitoring dan evaluasi, yang diadakan 3 bulan setelah pelaksanaan program.

2. Jenis Kebijakan yang Mendorong Masyarakat untuk Mengerjakan Sendiri Kebijakannya atau Masih Melibatkan Pejabat Pemerintah di Level Bawah

Berkaitan dengan hal ini, program PK2 di Desa Ngale dikelola langsung oleh aktor implementasi yaitu BUMDesa Ngale yang pengurusnya berasal dari masyarakat Desa Ngale. Selain itu ada juga Pokmas yang terdiri dari RTS yang ikut mengelola dana simpan pinjam dari program PK2 yang juga berasal dari masyarakat Desa Ngale. Sejak mengelola dana PK2 akhir 2018 kemarin, pengurus BUMDesa yang berkontribusi dalam pengelolaan dana PK2 hanya mendapatkan gaji atau insentif yang bisa dibilang cukup rendah, yaitu sebesar Rp 900.000 untuk ketua BUMDesa dan Rp 500.000 untuk bendahara BUMDesa. Meskipun hanya mendapatkan gaji atau insentif yang rendah, pengurus BUMDesa tetap menjalankan tugasnya untuk mengelola dana dari program PK2. Hal tersebut menunjukkan komitmen dari para pengelola program PK2, karena menurut mereka di desa itu berdasarkan pengabdian.

Dalam implementasi kebijakannya masyarakat Desa Ngale masih melibatkan birokrat di level bawah. Karena mulai dari pengajuan proposal dan penyusunan dokumen pencairan dana program PK2 ke Provinsi dilakukan oleh pemerintah desa. Selain itu tahapan awal program ini diawali dengan pra rebug

warga dan rebug warga yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan difasilitasi oleh pendamping desa dan Kabupaten untuk mensosialisasikan program PK2, merevitalisasi BUMDesa, dan penjaringan pendamping desa. Keterlibatan birokrat level bawah masih dibutuhkan dalam implementasi program PK2 di Desa Ngale, dalam hal ini pemerintah desa yang bertanggung jawab dalam implementasi program PK2 di tingkat desa, selain itu proses turunnya dari Provinsi melalui rekening desa, baru diserahkan ke BUMDesa.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa semua pihak yang terlibat baik dari pemerintah desa, BUMDesa, dan masyarakat penerima sudah cukup mendukung, hal ini terlihat dari respon masyarakat yang melaksanakan sendiri kebijakannya. Masyarakat penerima program PK2 memilih untuk menggunakan dana simpan pinjam program PK2 untuk dana pengembangan usaha di bidang pertanian, usaha kecil-kecilan, dan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya seperti tukang batu, tukang meubel. Dalam hal ini penggunaan dana nya harus sesuai dengan Pedoman Umum Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur tahun 2016.

3. Kebijakan yang Dibuat Sesuai dengan Harapan atau Keinginan Publik yang Menjadi Target

Pelaksanaan program PK2 di Desa Ngale diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Jalin Matra tahun 2016, dimana dalam Pergub tersebut menyebutkan beberapa tujuan yang menjadi harapan dari pelaksanaan program PK2. Pelaksanaan tiap tujuan tersebut, dapat dicermati apakah pelaksanaan dari program PK2 di Desa Ngale sesuai dengan harapan, keinginan publik yang menjadi target. Adapun tujuan dari program PK2 yang termuat dalam Peraturan Gubernur terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) adalah untuk membantu agar masyarakat rentan yang berada pada desil 2 dan desil 3 tidak terperosok pada desil 1. Sedangkan tujuan khusus program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) antara lain mendorong masyarakat rentan agar mampu mengatasi kerentanannya sendiri berdasarkan pada potensi sosial ekonomi lokal di desanya, mendorong agar masyarakat rentan mampu melakukan kegiatan ekonomi produktif berdasarkan pada potensi sosial ekonomi lokal di desanya, mendorong tumbuh dan berkembangnya BUMDesa yang mampu mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perekonomian perdesaan.

Pelaksanaan tujuan untuk mendorong masyarakat rentan agar mampu mengatasi kerentanannya sendiri berdasarkan pada potensi sosial ekonomi lokal di desanya diwujudkan dengan program simpan pinjam untuk para petani yang masuk kedalam RTS. Potensi lokal desa Ngale adalah sektor pertanian dan mayoritas masyarakatnya adalah

petani. Adanya simpan pinjam dari program PK2 ini dapat digunakan untuk mengembangkan pertanian padi dan bawang merah dengan menggunakan dana pinjaman murah dari program PK2 untuk membeli pupuk.

Pelaksanaan tujuan untuk mendorong agar masyarakat rentan mampu melakukan kegiatan ekonomi produktif berdasarkan pada potensi sosial ekonomi lokal di desanya diwujudkan dengan program simpan pinjam bagi RTS yang akan membuka atau mengembangkan usaha produktif. Selain masyarakatnya yang bekerja di sektor pertanian, ada juga sebagian yang membuka usaha kecil-kecilan. Dengan adanya dana simpan pinjam dari program PK2 bisa digunakan untuk mengembangkan usahanya, misalnya usaha berjualan bakso, mie ayam, warung, berjualan tempura, dan lain-lain, agar dapat menambah penghasilan RTS.

Tujuan pelaksanaan program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) yang terakhir adalah mendorong tumbuh dan berkembangnya BUMDesa yang mampu mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perekonomian perdesaan. Sebelum adanya program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Desa Ngale, pada tahun 2017 Desa Ngale telah memiliki BUMDesa. Namun pada waktu itu BUMDesa Ngale hanya sekedar berdiri, belum ada kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan perekonomian desa atau penanggulangan kemiskinan. Pada bulan Maret 2018 BUMDesa Ngale direvitalisasi untuk kesiapan pengelolaan dana dari program PK2. Dengan mendapat dana Rp 65.000.000 dari program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) bisa mendorong berkembangnya BUMDesa di Desa Ngale untuk mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perekonomian perdesaan.

Pelaksanaan program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Desa Ngale telah sesuai dengan harapan atau keinginan publik yang menjadi target. Bagi yang bermata pencaharian di bidang pertanian, adanya bantuan dana program PK2 ini telah menambah penghasilan panen mereka, dan bagi RTS yang membuka usaha produktif adanya bantuan dana program PK2 ini bisa meningkatkan dana saing usaha mereka dan menambah penghasilan RTS. Sehingga masyarakat rentan yang berada pada desil 2 dan 3 bisa mengatasi kerentanan mereka agar tidak terperosok ke desil 1. Kemudian dengan mendapat dana sebesar Rp 65.000.000 dari program PK2, BUMDesa Ngale bisa lebih berkembang untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perekonomian perdesaan.

4. Prakarsa Masyarakat Secara Langsung atau Melalui Lembaga Swadaya Masyarakat

Pelaksanaan program PK2 di Desa Ngale ini memang usulan dari masyarakat untuk bisa mendapatkan pinjaman murah tanpa harus mengantri

di bank atau meminjam di renternir, kemudian pemerintah Desa Ngale men gajukan proposal ke Provinsi untuk mendapatkan program program PK2 agar masyarakat bisa mendapatkan pinjaman murah. Berdirinya BUMDesa Ngale juga merupakan inisiatif dari tokoh masyarakat Desa Ngale yang difasilitasi oleh pemerintah desa, BPD dan LPMD melalui rebug desa.

PENUTUP

Simpulan

Pelaksanaan Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi diimplementasikan dengan jaringan aktor yang terlibat di tingkat Kabupaten yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi, Tenaga Pendamping Kabupaten, Pemerintah Desa Ngale, BUMDesa, Pendamping Desa Ngale untuk Program PK2 dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang terdiri dari Rumah Tangga sasaran (RTS). Jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat di tingkat bawah ditunjukkan dengan pengelolaan dana dari program PK2 dikelola sendiri oleh masyarakat melalui BUMDesa dan disalurkan kepada Pokmas. Dalam hal ini implementasi program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi masih melibatkan pejabat pemerintah di level bawah, yaitu pemerintah Desa Ngale. Kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan serta keinginan publik yang menjadi target, adanya pinjaman murah dari program PK2 merupakan harapan dan keinginan masyarakat Desa Ngale untuk mendapat pinjaman mudah dan murah selain dari renternir, dan Prakarsa masyarakat secara langsung, RTS yang membentuk Pokmas dan pengurus BUMDesa memprakarsai secara langsung dalam semua tahapan pengelolaan dana dari program PK2, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Tujuan program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) memang telah berhasil diimplementasikan di Desa Ngale. RTS telah berhasil mengembangkan usahanya melalui pinjaman murah dari program PK2, namun untuk data RTS nya masih ada yang kurang sesuai dengan kondisi sebenarnya dilapangan. Masyarakat yang seharusnya layak untuk menerima bantuan ternyata tidak terdaftar di data, dan dari 6 Dusun di Desa Ngale hanya 2 Dusun yang mendapatkan program PK2, sehingga menjadi kecemburuan sosial.

Jaringan aktor yang terlibat dalam Implementasi program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi ditingkat Kabupaten ada enam aktor utama yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi, Tenaga Pendamping Kabupaten, Pemerintah Desa Ngale, BUMDesa, Pendamping Desa Ngale untuk Program PK2 dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang terdiri dari Rumah Tangga sasaran (RTS). Dari keenam aktor tersebut semuanya telah menjalankan peran dan tugasnya

dengan baik meskipun di tingkat Kecamatan tidak ada Tim Fasilitasi Kecamatan (TFK) dan pengelola dana program PK2 dalam hal ini ketua dan bendahara BUMDesa hanya mendapatkan gaji yang sedikit. Selain itu jaringan aktor yang terlibat dalam hal ini pemerintah Desa Ngale, masih kekurangan kader desa yang kompeten dalam pengelolaan program, masyarakat masih kurang antusias dalam penjangkauan pengurus BUMDesa dan pendamping desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Masyarakat Desa Ngale mengelola sendiri dana pinjaman murah program PK2 melalui BUMDesa dan Pokmas dan masih melibatkan pejabat pemerintah di level bawah yaitu pemerintah Desa Ngale. Keterlibatan pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 13 Tahun 2016 tentang pedoman umum Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur tahun 2016. Ketika dalam proses implementasi pengelolaan pinjaman murah program PK2, pemerintah desa berperan sebagai penanggung jawab terlaksananya program PK2.

Harapan Rumah Tangga Sasaran (RTS) program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi adalah supaya masyarakat yang rentan miskin mendapatkan dana pinjaman murah agar terhindar dari bank kredit dan renternir. Anggaran dana Rp 65.000.000 dari program PK2 dikelola dengan sistem pinjaman murah kepada RTS, dengan bunga hanya 1% per bulan dan dapat diangsur selama 10 bulan. Dana pinjaman murah tersebut harapannya agar mendorong masyarakat yang rentan agar melakukan usaha produktif berbasis potensi ekonomi lokal.

Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Desa Ngale ini dulu awalnya merupakan usulan dari masyarakat Desa Ngale kepada pemerintah desa. Masyarakat ingin dimudahkan untuk mencari modal usaha tanpa harus mengantri di bank atau di renternir yang selama ini telah mewabah pada masyarakat. Hal itu ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dengan membentuk BUMDesa. Kemudian pada tahun 2018 pemerintah Desa Ngale mengajukan proposal program PK2 ke Provinsi. BUMDesa yang beridiri saat ini juga merupakan prakarsa atau inisiatif dari masyarakat Desa Ngale.

Saran

Sebagai akhir dari penelitian ini, saran yang dapat peneliti berikan terhadap Implementasi Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :

1. Dalam penentuan data penerima harus melibatkan pemerintah desa sebagai pejabat pemerintah di level bawah, agar data penerima yang telah ditentukan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan dan pemberian bantuan bisa lebih tepat sasaran.
2. Peningkatan insentif atau gaji kepada ketua dan bendahara BUMDesa, agar menjadi pendorong bagi pengelola BUMDesa dalam menjalankan pengelolaan dana dari program PK2.

3. Perlu adanya penambahan Rumah Tangga Sasaran penerima bantuan, agar program PK2 bisa lebih dirasakan oleh masyarakat yang lebih banyak.
4. Diharapkan untuk program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) bisa berkelanjutan karena sangat dibutuhkan masyarakat agar masyarakat rentan miskin tidak terjatuh pada jurang kemiskinan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. serta mengucapkan terima kasih kepada Dosen Penguji Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. dan Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., MA.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Timur 2011-2018. <http://jatim.bps.go.id/> . Diakses pada tanggal 7 Februari 2019
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Dewi, Yuni Syahara Rahma. 2013. "Strategi Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Surabaya
- Ilmiah, Rosyidatul. 2017. *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Surya Sejahtera di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo*. (online), (ejournal.unesa.ac.id, diunduh 05 Februari 2019)
- Nugroho D, Riant. 2008 *Public Policy*. Jakarta : Salemba Empat
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Dialih bahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso*. Jakarta : Kencana
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik* . Bandung : Alfa Beta.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Tahun 2016. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Surabaya
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara. Jakarta

- Sasmito, Cahyo dan Ertien Rining Nawangsari. 2019. *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu*. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), Vol. 3 No. 2
- Soekarwo. 2016. *Pedoman Umum Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan*. Surabaya: Badan Pemberdayaan Masyarakat
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfa Beta
- Suwinta, Anyriya Eka. 2016. *“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar”*. Ejournal.unesa.ac.id (online) Surabaya : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2017. *Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan*. www.tnp2k.go.id . Diakses tanggal 3 Juli 2018
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing
- Yeni Nurmawati, Thomas Soseco. 2017. *The Effectiveness Of Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan Programme in Village of Ngroto*. ISSN(P) 2086-1575 E-ISSN 20502-7115 , JESP-Vol.9., No 2
- Yulianto, Kadji. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo : UNG Press